



JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 14, Nomor 3, November 2020: i-xxii

Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018

p-ISSN : 1978-2292 (print)

e-ISSN : 2579-7425 (online)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Penasihat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi (Editor)** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)** : 1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S., M.Si.
5. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
6. Haryono, S.Sos., M.H.
7. Imam Lukito, S.T., M.H.
8. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
- Redaksi Pelaksana** : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris** : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Ibnu Prasetyo, S.H.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor)** : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. B. Lora Christyanti, S.IP.
3. Amirah Balqis S.H.
4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.
5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
- Teknologi Sistem Informasi** : 1. Machyudhie, S.T.
2. Mochamad Arip, S.Kom.
3. Harysandy Permana, S.Kom.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com

ejournalkebijakan@gmail.com

HALAMAN KOSONG

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
FISIP Universitas Indonesia

2. Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

3. Andry Indrady, Amd. Im, Grad.Dip.PA, MPA, Ph.D
Kantor Imigrasi Yogyakarta

4. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

5. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Universitas Islam Indonesia

6. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (ARTICLES)

1. Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah 403-418
Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono
2. Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah 419-434
Eka N.A.M. Sihombing, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
3. Pengeluaran Tahanan demi Hukum Bagi Tersangka dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia..... 435-444
Ahmad Sanusi
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan..... 445-468
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
5. Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan 469-492
Insan Firdaus
6. Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* dengan Prinsip *Jus Cogens* pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia 493-516
Rohmad Adi Yulianto
7. Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing dalam Mencegah Penyebaran Covid-19..... 517-538
Desinta Wahyu Kusumawardani
8. Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas *Equality Before The Law*..... 539-552
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari

TINJAUAN HUKUM (REVIEW)

9. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik 553-578
Edward James Sinaga
10. Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten *Youtube* yang dijadikan Sumber Berita..... 579-596
Antonio Rajoli Ginting

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada Volume 14 Nomor 3, November 2020 ini, redaksi memuat artikel sebanyak 10 tulisan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia, mulai dari administrasi hukum umum, keimigrasian, peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, hingga pengawasan. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM namun juga dari Institusi/Akademisi dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 14,

p-ISSN: 1978-2292
(print) e-ISSN:

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



BALITBANG HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

HALAMAN KOSONG

***The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge***

Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono

Dualism Supervision Authority of Local Regulation Draft by Central Government and Regional Representative Council

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, have given the Regional Representative Council (DPD) the authority to conduct an evaluation and monitoring of Local Regulation and Local Regulation Draft. Indicates the dualism of the power to evaluate the Local Regulation Draft between the Central Government and DPD. This research focuses on answering the questions:

(a) how is the authority to supervise the Local Regulation Draft in the Indonesian legal system? (b) what is the implication of dualism in managing the draft regional regulation on the legal certainty of supervising the Local Regulation Draft and regulating the authority of government affairs which is the domain of local Government? The normative legal research, by analyzing secondary data in the form of laws and regulations and literature related to the supervision of the Local Regulation Draft, especially related to the evaluation of the Local Regulation Draft. The results indicate that the supervisory authority of the Local Regulation Draft by the DPD has normatively expanded the scope of the Local Regulation Draft that can be evaluated, with some legal notes that need to be considered in the exercise of that authority.

Keywords: *dualism; supervision; draft; local regulation*

Eka N.A.M. Sihombing, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

The use of artificial intelligence (AI) in the process of establishing local legislation in the era of the industrial revolution 4.0 seemed to get justification to minimize the disharmony between local legislation and various other laws and regulations. However, the use of AI cannot completely replace the authority of local legislative forming organs; of course, this still causes debate. The problem raised in this paper is what the implementation of using artificial intelligence in the formation of local legislations is? The research method used is the socio-legal research method. The results showed that the use of AI in the process of establishing a Local Legislation does not necessarily replace the role and function of the organ forming a regulation. The use of AI in the process of establishing local legislation is positioned only as a tool that can predict the potential disharmony between local legislation and various other laws and regulations. Accommodate the use of AI in the process of establishing local legislation, and it is necessary to amend the Law Number 12 the Year 2011, the Law Number 23 the Year 2014 and its legislation related to the formation of local legislation.

Keywords: *artificial intelligence; local legislation; formation*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Ahmad Sanusi

Expenditure for Legal Responsibility for The Suggested in The Perspective of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

The State Detention Center as one of the sub-systems of the criminal justice system, especially in detention management, is essential because detention institutions are not only a legal issue but also related to the human rights issue of a suspect, so the question arises about the legal perspective. And human rights regarding the release of prisoners for the sake of law for the suspect. Furthermore, the human rights perspective on the release of prisoners for the sake of the law for the suspect. This research aims to know the release of prisoners by law by the head of the state detention centre juridically—a human rights perspective for the suspect, the method used in the typology of normative legal research. The release of prisoners by law by the Head of State Detention Centers as regulated in Article 19 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code (KUHP) is sufficiently strong juridically, will, however, prior notification is required to the law enforcer who is responsible for detaining a minimum of 10 (ten) days before the detention period ends. For increase law enforcement cooperation, it is necessary to build a correspondence administration system among law enforcement specialized units (Police, Attorney General's Office, District Courts, State Detention Centers / Correctional Institutions).

Keywords: *the release of detainees for the sake of the suspect's law; legal perspective; human rights*

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho

Probation Officers Roles in order to Support The Correctional Revitalization

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

This research examined the revitalization of correctional administration, especially related to the role of probation officers. They have a strategic role in correction revitalization that is the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication phases. The core business is community research, guidance, legal assistance, supervision, and a team of correctional observers. This research used a mix-method approach, namely, quantitative and qualitative. It consisted of primary data obtained from respondents with a google form questionnaire, a depth-interview with informants, and secondary data collected by books, journals, regulations, theory, and other literature. The results showed that the role had not optimized yet, It was influenced by some factors that were, a lack of the capacity, competence, and skills of the probation officers then, the ratio of the number of clients to the probation officers, budget support, facilities, and infrastructure to carry out the goals. Then the obstacles, namely the difference in perceptions of regulations/rules between correctional technical implementing units related to the duties and functions of probation officers, their skills, in terms of capacity, quantity, and quality to support the revitalization of correctional and lacking budget were factors that affected the optimization of their duties and functions.

Keywords: *correctional revitalization; probation officer; community research*

***The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge***

Insan Firdaus

Policy Analysis on Optimizing Narcotics Rehabilitation Implementation in Corrective Technical Services Unit

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

Narcotics rehabilitation is a training program needed by prisoners who are categorized as addicts, abusers and victims of narcotics abuse. However, the implementation of narcotics rehabilitation has not been optimal. The research question is how the implementation and constraints and efforts to optimize the performance of narcotics rehabilitation at the UPT Penitentiary? The purpose of this study was to determine the implementation and implementation constraints of narcotics rehabilitation as well as efforts to optimize implementation in the Correctional Unit. This research is evaluative using a qualitative approach—this research data collection through literature review and focuses group discussion. Based on the research results, it can be concluded that in general, the Correctional Unit has implemented narcotics rehabilitation by the implementation guidelines; however, there are still obstacles in several aspects, namely human resources, accuracy of targeting, rehabilitation system and institutions. Efforts to optimize narcotics rehabilitation in Correctional UPT are strengthening institutions, human resources and the rehabilitation system. Therefore, the Directorate General of Corrections must make several efforts, namely revising the guidelines for the implementation of narcotics rehabilitation, increasing cooperation with other agencies and restructuring the Correctional UPT organization.

Keywords: *narcotics; rehabilitation; correctional institution*

Rohmad Adi Yulianto

Integrating Non-refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

Humanitarian problems that occurred in various countries led to human migration across countries. Indonesia became one of Southeast Asia countries that were a destination for transit before the asylum-giving states granted refugees asylum and the cross-country refugee migration affects the formation of supranational regulations. This study analyzes the relationship between the principle of nonrefoulement and the norm of certainty contained in the jus cogens principle in international law. This research uses a philosophical, juridical approach by describing the relationship between naturalist, positivist, and cosmopolis in international law. This study concludes that the policy of handling refugees in Indonesia does not underline state compliance with the principle of nonrefoulement to the 1951 convention on refugees, but rather based on international covenants and on Human Rights and Civil Rights that have been ratified by the Indonesian Government through law Number 5 of 1998, Indonesia Law Number 39 of 1999, and Republic of Indonesia Law Number 12 of 2005. This study also concluded that the three philosophies of the international legal regime, naturalist, positivist and cosmopolitan, had similarities in mapping the basis of state compliance with supranational rules, that is the presence of voluntary state attitudes to enter agreements with other countries.

Keywords: *refugee; handling; jus cogens; nonrefoulement*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Desinta Wahyu Kusumawardani

National Protection through Foreigners Entry Restriction to Prevent Covid-19 Outbreak

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

In December 2019, the Coronavirus Disease (Covid-19) was first identified in Wuhan City, China and quickly spread to various countries. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Kemenkumham) through the Directorate General of Immigration takes a policy to prevent the spread of the virus. This journal explains the policy strategy undertaken by the Ministry of Law and Human Rights in response to efforts to prevent the spread of Covid-19. In more depth, through a public policy perspective, the author analyzes the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2020 concerning the Temporary Entry Restriction for Foreigners from Entering the Territory of the Republic of Indonesia. The research methodology uses a qualitative approach through secondary data studies in the form of books, documents and event records. Based on the results of the study, the dynamics of the policy strategy involved the issuance of Minister of Law and Human Rights Ministerial Regulations (Permenkumham), namely Permenkumham No. 3, 7, and 8 of 2020. This policy strategy was effective in reducing the number of people from or to abroad. Furthermore, through Permenkumham No.11 of 2020, there are exceptions for foreigners who work in National Strategic Projects that can enter Indonesia's territory. The Covid-19 pandemic is a lesson for the Government to improve early detection capabilities for potential non-natural disasters, and to implement appropriate policies as an effort to prevent and overcome viruses.

Keywords: covid-19; public policy; entry restriction

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari

Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

Structural, legal aid assumes that community poverty is more due to structural imbalances. If the old paradigm of legal assistance only relies on legal assistance through traditional channels, without being supported by a structural style approach, then the regular aid movement will not be significant. The aid strategy through legal channels must be supported by an action that destroys this inequality. The problems of providing legal aid to the community and how to reflect on the principle of equality before the law through the provision of structural and non-structural legal assistance are the topics of discussion in this study. The research method used is a qualitative approach, data collection methods through literature study, and data analysis techniques are qualitative. The results of the study show that the problematic provision of structural and non-structural legal aid is influenced by the normative legal framework for providing non-working legal assistance, etc..

In contrast, the reflection of the principle of equality before the law relating to the provision of structural and non-structural legal aid has been included in Article 28D paragraph (1) The 1945 Constitution, namely that everyone has the right to just recognition, guarantee, protection and legal certainty as well as equal treatment before the law. This principle is very vital in providing structural and non-structural legal aid. It is also a consequence of the State of Indonesia as the rule of law (Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution resulting from the third amendment). There are three principles of the rule of law (resistant), namely the supremacy of law, equality before the law, and law enforcement in ways that are not against the law (due process of law).

Keywords: aid; legal; structural; non-structural; equality before the law

***The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge***

Edward James Sinaga

Royalty on The Management of Copyright Songs and Music

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

The right to exploit a work rests with the author and, or the Copyright Holder. Giving permission or license based on an agreement is one way to transfer of exploitation rights from the creator to the copyright holder. Regarding licensing to announce songs and, or Music in Indonesia is carried out by the Collective Management Institute, whose arrangements are still multiple interpretations that can lead to conflict. This study aims to explore the Licensing process for Song and, or Music Copyright Announcements and analyze the Royalty Management of Song and, or Music Copyright Management Announcements. This research is descriptive empirical law research. Based on this research, the result is that it is very much needed an institution that can represent the songwriters and related rights holders to carry out licenses that can help bridge the collaboration between the creator or copyright holder with the user. However, the implementation of royalty management on the announcement of Cipta Karya and, or Music has not run smoothly. That implementation is because the legal awareness of the copyright user community is still lacking, and the maximum socialization carried out by the Collective Management Institute.

Keywords: *copyright; announcement; management; royalty*

Antonio Rajoli Ginting

***Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content
As The Source of News***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 3, November 2020

Digital content on YouTube is a cinematographic work that is protected by copyright. Many of this content was used as news material without creator permission. Those practices could harm the right of content creators, especially when the news material is different from the published content. Hence, this paper would examine the form of violation and protection of moral rights and the economic rights of YouTube content that was cited for the news and how to resolve the dispute. This research is a descriptive normative legal research. Later, this research found out that there is copyright violation on publishing news without asking permission the YouTube-content owner whom they got the benefit. The protection of moral rights and economic rights is guaranteed through complaints that can be submitted to the investigator and the press council. Dispute resolution can be made through litigation to the Commercial Court or through non-litigation, namely mediation. Moral rights and economic rights to the content that are used as news sources can be protected by making various legal efforts. The author's suggestion in this study is the need for adequate supervision in creating maximum protection for YouTube content.

Keywords: *protection; youtube content; news source*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap Perda dan rancangan Perda. Hal tersebut mengindikasikan adanya dualisme kewenangan evaluasi rancangan Perda antara Pemerintah Pusat dengan DPD. Penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan: (a) bagaimana kewenangan pengawasan rancangan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia? (b) bagaimana implikasi dualisme pengawasan rancangan Peraturan Daerah terhadap kepastian hukum pengawasan rancangan Peraturan Daerah dan pengaturan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintahan daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi pengawasan rancangan Perda dan implikasi dualisme pengawasan rancangan Perda antara DPD dan Pemerintah Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan pengawasan rancangan Perda, khususnya terkait evaluasi rancangan Perda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan rancangan Perda oleh DPD secara normatif telah memperluas lingkup rancangan Perda yang dapat dievaluasi, dengan beberapa catatan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kata kunci: dualisme; pengawasan; rancangan; peraturan daerah

Eka N.A.M. Sihombing, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra (UMSU dan UMA)

Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan buatan tidak dapat serta merta menggantikan kewenangan organ pembentuk perda secara menyeluruh, tentunya hal ini masih menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan Peraturan Daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosio legal, dalam konteks penelitian ini juga akan dilihat apakah penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan Perda memiliki pijakan secara teoritis yang diutarakan para ahli, maupun basis yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda tidak serta merta dapat menggantikan peran dan fungsi organ pembentuk perda. Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda diposisikan hanya sebatas alat bantu yang dapat memprediksi potensi disharmoni antara perda dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk mengakomodir penggunaan AI dalam Proses pembentukan perda diperlukan perubahan terhadap UUP3, UU Pemda dan peraturan perundang-undangan turunannya yang berkaitan dengan pembentukan perda.

Kata kunci: kecerdasan buatan; pembentukan; peraturan daerah

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Ahmad Sanusi (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta)

Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*an criminal justice sistem*) khususnya dalam pengelolaan penahanan menjadi penting karena lembaga penahanan bukan saja menjadi masalah hukum, akan tetapi terkait juga dengan masalah hak asasi seorang tersangka, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap pengeluaran tahanan demi hukum bagi tersangka. Pertanyaan selanjutnya bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pengeluaran tahanan demi hukum bagi tersangka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara juridis formil pengeluaran tahanan demi hukum oleh kepala rumah tahanan negara; dan perspektif hak asasi manusia bagi tersangka, metode yang digunakan tipologi penelitian hukum normatif, pengeluaran tahanan demi hukum oleh Kepala Rumah Tahanan Negara sebagaimana diatur Pasal 19 Ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah cukup kuat secara juridis, akan tetapi diwajibkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penegak hukum yang bertanggungjawab menahan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanan. Untuk peningkatan kerjasama penegakan hukum, perlu kiranya membangun sistem administrasi persuratan antar unit pelaksana teknis penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan).

Kata kunci: pengeluaran tahanan demi hukum tersangka; perspektif hukum; hak asasi manusia.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Penelitian ini membahas tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan khususnya tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sangat strategis dalam revitalisasi pemasyarakatan dari fase pra adjudikasi, adjudikasi maupun fase pasca-adjudikasi. Core bisnis Pembimbing Kemasyarakatan adalah penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan tim pengamat pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix-method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui *google form*, wawancara dengan informan serta data sekunder yang berupa buku, jurnal, peraturan-perundangan, teori, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena terkait 2 hal yaitu **pertama:** permasalahan intensifikasi dan ekstensifikasi. Isu intensifikasi terkait bobot kapasitas dan kompetensi serta *skill* Pembimbing Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan. Bobot ekstensifikasi yaitu tentang jumlah, rasio jumlah klien dengan ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai untuk menjalankan revitalisasi pemasyarakatan. **Kedua** adalah kendala yaitu perbedaan persepsi regulasi/aturan antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan terkait tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik kapasitas, kuantitas maupun kualitas dan anggaran yang kurang memadai menjadi faktor yang mempengaruhi optimalnya tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan.

Kata kunci : revitalisasi pemasyarakatan; pembimbing kemasyarakatan; litmas

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Insan Firdaus (Peneliti Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Rehabilitasi narkotika merupakan program pembinaan yang dibutuhkan oleh tahanan dan warga binaan masyarakat yang dikategorikan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Namun pelaksanaan rehabilitasi narkotika tersebut berjalan belum optimal. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan kendala serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di UPT Masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan rehabilitasi narkotika serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan di UPT Masyarakat. Penelitian ini bersifat evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui kajian literatur dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya UPT Masyarakat sudah melaksanakan rehabilitasi narkotika sesuai dengan petunjuk pelaksanaan namun demikian masih terdapat kendala dalam beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, ketepatan sasaran, sistem rehabilitasi dan kelembagaan. Upaya untuk mengoptimalkan rehabilitasi narkotika di UPT Masyarakat yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan sistem rehabilitasi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Masyarakat harus melakukan beberapa upaya, yaitu merevisi petunjuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan restrukturisasi organisasi UPT Masyarakat.

Kata kunci: rehabilitasi; narkotika; masyarakat

Rohmad Adi Yulianto (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, Bekasi)

Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* dengan Prinsip *Jus Cogens* pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Problematika kemanusiaan yang jamak terjadi di berbagai negara memunculkan fenomena migrasi manusia lintas negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan singgah migrasi pengungsi sebelum mereka diberikan suaka oleh negara-negara pemberi suaka. Migrasi pengungsi lintas negara mempengaruhi terbentuknya regulasi supra nasional tentang perlindungan, status, dan hak-hak para pengungsi pencari suaka, baik di negara penerima maupun negara singgah. Penelitian ini menganalisis hubungan antara prinsip *non-refoulement* dengan norma kepastian yang terkandung di dalam prinsip *jus cogens* pada sumber hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan memaparkan hubungan antara tiga aliran dalam hukum internasional: naturalis, positivis, dan kosmopolis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia tidak melandaskan kepatuhan negara atas prinsip *non-refoulement* terhadap konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, melainkan berdasarkan kepada kovenan dan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1998, Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999, dan Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2005. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ketiga aliran filsafat rezim hukum internasional; Naturalis, Positivis, dan Kosmopolis, memiliki kesamaan dalam menetapkan dasar kepatuhan negara terhadap aturan-aturan supranasional, yaitu terdapatnya sikap negara secara sukarela untuk mengikat diri ke dalam kesepakatan dengan negara lain.

Kata kunci: penanganan; pengungsi; *jus cogens*; *non-refoulement*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Desinta Wahyu Kusumawardani (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya)

Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing dalam Mencegah Penyebaran Covid-19

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Pada Desember 2019, *Coronavirus Disease* (Covid-19) pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Menyadari bahwa perjalanan orang masuk/keluar negara potensial menjadi *carrier* bagi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) mengambil kebijakan regulatif sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Jurnal ini menjelaskan mengenai strategi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam merespon upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Secara lebih mendalam, melalui perspektif kebijakan publik, penulis menganalisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi data sekunder berupa buku, dokumen, dan catatan peristiwa. Berdasarkan hasil studi, dinamika strategi kebijakan melibatkan tiga penerbitan Peraturan Menteri Kemenkumham (Permenkumham) yakni Permenkumham Nomor 3, 7, dan 8 Tahun 2020. Strategi kebijakan tersebut efektif menurunkan angka perjalanan orang dari/ke luar negeri. Selanjutnya, melalui Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, Kemenkumham kembali meregulasi pembatasan pergerakan orang dengan pengecualian demi kepentingan proyek strategis nasional. Kebijakan ini memungkinkan adanya pergerakan orang dari/ke luar negeri. Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi bencana nonalam, dan menerapkan kebijakan yang tepat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus.

Kata kunci: covid-19; kebijakan publik; pembatasan WNA

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari (Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS))

Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas *Equality Before The Law*

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknis analisis data bersifat kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural dipengaruhi oleh kerangka hukum normative pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja, dll, sedangkan refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Kata kunci: bantuan; hukum; struktural; non struktural; *equality before the law*

Edward James Sinaga (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)

Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan terletak pada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Salah satu pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian. Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau Musik di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang pengaturannya masih multitafsir yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses Lisensi atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan menganalisis Implementasi pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa sangat diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait untuk melaksanakan lisensi yang dapat membantu menjembatani kerja sama antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna. Namun, pelaksanaan pengelolaan royalti pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik belum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat pengguna hak cipta masih sangat kurang serta belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Kata kunci: hak cipta; pengumuman; pengelolaan; royalti

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Antonio Rajoli Ginting (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Jakarta)**

**Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten *Youtube* yang Dijadikan Sumber
Berita**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020

Konten YouTube sebagai salah satu karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Konten YouTube tersebut seringkali dijadikan sumber berita oleh media massa online. Materi konten YouTube yang diambil menjadi berita seringkali tidak melakukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pencipta konten tersebut. Hal ini dapat merugikan pemilik konten apalagi kalau materi berita tersebut berbeda dengan isi konten yang diterbitkan. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk pelanggaran dan perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan berita dan bagaimana penyelesaian sengketaanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasilnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan memuat berita yang tidak sesuai dengan konten YouTube dan tidak memohon izin terlebih dahulu kepada pemilik konten untuk dijadikan berita dimana media massa tersebut memperoleh keuntungan. Perlindungan hak moral dan hak ekonomi dilakukan dengan cara delik aduan yang dapat disampaikan kepada penyidik maupun dewan pers. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga ataupun melalui jalur non litigasi yakni mediasi. Hak moral dan hak ekonomi terhadap konten yang dijadikan sebagai sumber berita dapat dilindungi dengan melakukan berbagai upaya hukum. Saran penulis dalam kajian ini adalah perlunya pengawasan yang baik dalam menciptakan perlindungan yang maksimal terhadap konten YouTube.

Kata kunci: perlindungan; konten youtube; sumber berita

HALAMAN KOSONG